

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Aliman Syahuri Zein**

IAIN Padangsidimpuan

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan

Email: [alimansya@gmail.com](mailto:alimansya@gmail.com)

**Abstrak,**

Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya fenomena penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2001, 2005, 2009 dan 2016 meskipun populasi dan pengeluaran pemerintah justru meningkat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori bahwa PAD merupakan indikator kesiapan daerah yang dapat mendorong pemerintah, bisnis, dan masyarakat daerah melalui pengenaan pajak dan retribusi yang sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan BANTALAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh populasi dan pengeluaran pemerintah pada PAD Provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa deret waktu. Data yang digunakan adalah 30 sampel yang diperoleh melalui situs web [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Tes dalam penelitian ini menggunakan program Eviews Versi 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh populasi pada PAD Provinsi Sumatera Utara, karena  $p\text{-value} > \alpha$  ( $0,0831 > 0,05$ ). Namun, untuk belanja pemerintah pada PAD di Provinsi Sumatera Utara, karena  $p\text{-value} < \alpha$  ( $0,0000 < 0,05$ ). Bersamaan dengan itu ada pengaruh populasi dan pengeluaran pemerintah pada PAD Provinsi Sumatera Utara, karena  $p\text{-value} < \alpha$  ( $0,000000 < 0,05$ ). Kontribusi penduduk dan belanja pemerintah pada PAD Provinsi Sumatera Utara adalah 92,45% sedangkan sisanya 7,55% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Model regresi penelitian adalah  $PAD = -2651676 + 252,3164JP + 0,447383PP + e$ .

**Kata Kunci:** PAD, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah.

**Abstract,**

*The problem in this study is the occurrence of a phenomenon of a decrease in regional original income (PAD) in 2001, 2005, 2009 and 2016 even though the population and government expenditure actually increased. This is certainly not in line with the theory that PAD is an indicator of regional readiness that can encourage government, business, and regional communities through the imposition of taxes and levies that are in accordance with the level of community income, so that they can increase PAD. The purpose of this study is to see the effect of population and government expenditure on the PAD North Sumatra provincial both partially and simultaneously. This research is a descriptive quantitative research using secondary data types in the form of time series. The data used is 30 samples obtained through the website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). The test in this study uses the Eviews Version 9.0 program. The results showed that partially there was no influence of the population on PAD the North Sumatera Province, because the  $p\text{-value} > \alpha$  ( $0.0831 > 0.05$ ). However, for government expenditure on PAD in North Sumatera province, because the  $p\text{-value} < \alpha$  ( $0.0000 < 0.05$ ). Simultaneously there is an effect of the population and government expenditure on PAD the North Sumatera Province, because the  $p\text{-value} < \alpha$  ( $0.000000 < 0.05$ ). The contribution of the population and government expenditure on PAD the North Sumatera Province was 92.45% while the remaining 7.55% was influenced by other factors not included in the study. The research regression model is  $PAD = -2651676 + 252.3164JP + 0.447383PP + e$ .*

**Keywords:** PAD, Total Population, Government Expenditure.

## **PENDAHULUAN**

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan peralihan sistem pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola keuangannya sehingga pembangunan daerah diharapkan menjadi lebih baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu tolak ukur yang penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). PAD dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pajak, retribusi, dan pengeluaran. Faktor-faktor tersebut berkorelasi dengan jumlah penduduk suatu daerah.

Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi tentu akan meningkat. Jumlah penduduk merupakan salah satu masalah dalam pembangunan yang paling utama dan paling sulit untuk diatasi. Para ahli kependudukan dan ahli ekonomi menyadari bahwa pengurangan tingkat perkembangan penduduk di negara berkembang merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk mempercepat lajunya perkembangan ekonomi.

Disisi lain, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian (Guritno, 1998).

Pengeluaran pemerintah diperuntukkan dalam membeli barang dan jasa, dari kegiatan tersebut pemerintah tidak hanya melakukan pengeluaran semata-mata, melainkan adanya kegiatan dalam hal penerimaan berupa pajak dan retribusi sebagai upaya keikutsertaan masyarakat dalam hal membangun sarana publik yang seluruh masyarakat dapat menikmati dan mempergunakannya sehingga memperlancar kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari campur tangan pemerintah sehingga sumber penerimaan pemerintah akan bertambah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Proses pertumbuhan kegiatan

ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan daerah lainnya. Berikut ini merupakan data perkembangan PAD, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1**  
**Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah**  
**Provinsi Sumatera Utara Periode 2000-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah</b>
2000	2.555.100	11.514	416.800
2001	423.100	11.722	916.200
2002	614.400	11.847	1.021.300
2003	908.300	11.890	1.352.000
2004	1.143.100	12.123	1.501.500
2005	1.018.000	12.327	1.830.600
2006	1.368.200	12.643	2.184.600
2007	1.503.000	12.834	2.717.900
2008	2.181.300	13.042	2.967.300
2009	2.016.070	13.248	3.444.400
2010	2.226.500	12.982	3.833.100
2011	3.181.890	13.104	4.677.800
2012	4.052.100	13.215	7.633.500
2013	4.809.370	13.326	8.866.900
2014	4.944.500	13.767	8.525.300
2015	5.257.670	13.977	8.679.300
2016	4.630.000	14.103	9.950.844

Catatan: data dalam juta rupiah

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa dalam beberapa tahun (2001, 2005, 2009, dan 2016) terjadi peningkatan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah, padahal PAD Sumatera Utara justru mengalami penurunan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori Harrod-Domar dalam Sadono Sukirno yang mengatakan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian

untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat (Sadono, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun secara simultan.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Mudrajad kuncoro memberikan penjelasan bahwa pendapatan daerah dapat dilihat dari sisi mikro dan makro. Secara mikro di dalam pemerintah daerah adanya komabilitas antara komponen yang ada dalam pemerintah daerah. Sedangkan secara makro menghendaki interaksi atau komabilitas diantara pemerintah (*publik*), swasta (*private*), dan masyarakat (*community*) (Mudrajad Kuncoro, 2010). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pemerintah (pengatur kebijakan), pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja), dan masyarakat (baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen).

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih dapat dikatakan rendah. Namun demikian, perolehan PAD setiap tahun meningkatakan tetapi belum mampu mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah (Fuadi, 2016). Pendapatan asli daerah memang terlihat selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi peningkatan PAD yang betul-betul diharapkan belum tercapai dengan maksimal, sehingga masih dibutuhkan berbagai upaya untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah yang sesungguhnya.

Pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pemerintah (pengatur kebijakan), pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja), dan masyarakat (baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen). Ketiga elemen di atas mempunyai peran penting yang sama-sama dapat menunjang pendapatan daerah menjadi lebih baik (Mudrajat, 2010).

Dalam sudut pandang Islam, pendapatan merupakan upaya negara dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena pada dasarnya hakikat permasalahan ekonomi berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi (Fuadi, 2016). Untuk mencapai distribusi ekonomi yang adil, Abdurrahman Al Maliki mengemukakan bahwa perlu adanya jaminan atas pemenuhan kebutuhan primer setiap

individu secara menyeluruh dan dapat membantu setiap individu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuannya (Fuadi, 2016).

### **Jumlah Penduduk**

Penduduk memiliki fungsi ganda dalam sebuah perekonomian. Dalam konteks pasar dari sisi permintaan, penduduk merupakan konsumen sumber permintaan akan barang-barang dan jasa. Sedangkan pada sisi penawaran, penduduk merupakan produsen. Dalam berbagai literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi berkat adanya masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat dan memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang (Dumairy, 1996). Penduduk dapat dikatakan sebagai pemegang peran penting baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai pelaku dalam pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan secara nasional.

Menurut J.M. Keynes penambahan penduduk bukanlah sekedar penambahan penduduk semata tetapi juga dapat menaikkan daya beli (*purchasing power*) (Julius, 2015). Artinya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu unsur terpenting dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat melalui pendapatan yang diperoleh. Jadi, bila pertumbuhan penduduk lebih besar, maka permintaan secara umum akan meningkat sehingga pasar semakin luas dan laba semakin besar, akibatnya mendorong multi investasi yang lebih besar pula dan pembangunan semakin maju begitu juga dengan pendapatan.

Manusia atau penduduk dalam tatanan ekonomi Islam merupakan tujuan sekaligus sasaran dalam kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena manusia telah berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dimana sebagai khalifah, Allah memberi manusia beberapa kemampuan dan sarana sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya. Oleh karena itu, manusia wajib beramal, berkreasi, dan berinovasi dalam setiap pekerjaannya. Maka, tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam dimana manusia merupakan sarana dan pelaku dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah *Ibrahim* ayat 32-34.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membiayai berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pengeluaran pemerintah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi agar menjadi lebih baik dan efisien. Menurut WW Rostow dan RA pengeluaran pemerintah dihubungkan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi menurut mereka

rasio investasi pemerintah terhadap investasi total, dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana (Dumairy, 1996).

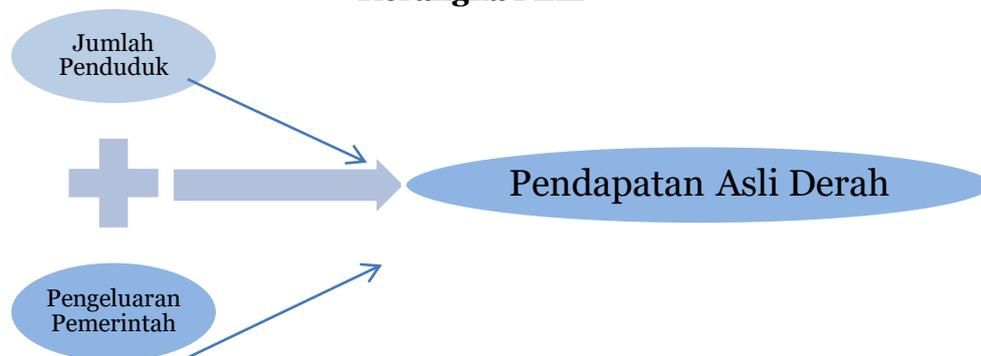
Teori yang sama juga mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, akan tetapi rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil (Dumairy, 1996). Selanjutnya menurut Peacoc dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi, dalam keadaan normal kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah (Dumairy, 1996). Dari berbagai pendapat di atas, dapat dilihat hubungan antara pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya melalui kebijakan atas kewajiban membayar pajak dari masyarakat agar pembangunan ekonomi terbantu dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan pendistribusian pendapatan yang merata.

Pengeluaran dalam konteks ekonomi Islam sejalan dengan pesan Alquran surah *Al-Baqarah* ayat 219, yang berbicara tentang kebijakan pengeluaran yang cukup luas untuk distribusi pendapatan yang berimbang. Pengeluaran dalam konteks ini tentunya bukan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, akan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja pada awal pemerintahan Islam cukup sederhana dibandingkan sistem anggaran saat ini. Dasar anggaran pada masa pemerintahan Islam ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan anggaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Sedangkan konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran yang berimbang antara pengeluaran dan penerimaan negara sama (Rozalinda, 2000).

### **Kerangka Pikir**

Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu memperbaiki jumlah pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak dan pendapatan lain dari masyarakat yang disalurkan kepada pemerintahan daerah, sehingga pembangunan ekonomi provinsi Sumatera Utara dapat meningkat. Berikut gambar kerangka pikir penelitian.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir**



### Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritik di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun secara simultan.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun secara simultan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan jenis data sekunder berbentuk data *time series* secara tahunan. Data diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 data, yaitu data dari tahun 1987-2016. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program *evIEWS* versi 9.0. Adapun tahapan uji analisa data yang digunakan meliputi; Uji normalitas, dengan metode uji *Jarque Bera* (JB). Data akan dikatakan normal jika nilai *p-value* >  $\alpha$ . Uji linieritas, variabel dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila nilai signifikan <  $\alpha$ . Uji Asumsi Klasik, uji ini dilakukan sebagai prasyarat terhadap analisis regresi beranda. Uji asumsi klasik terdiri dari: *pertama*; uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Data akan dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10. *Kedua*; uji autokorelasi dilakukan dengan uji LM menggunakan metode *Bruesch Godfrey*. Metode ini didasarkan pada nilai *Obs\*R-Squared*, dimana jika *Obs\*R-Squared* >  $\alpha$ , maka data bebas dari masalah autokorelasi. *Ketiga*; uji heteroskedastisitas

dilakukan dengan uji *white heteroskedastisitas*. Dimana jika nilai  $Obs*R-Squared > \alpha$ , maka data dikatakan bebas dari heterokedastisitas.

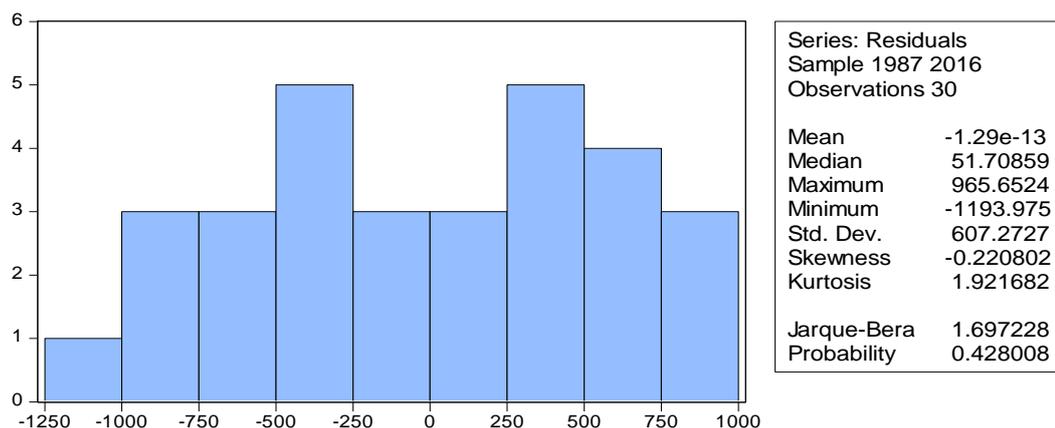
Uji Hipotesis, untuk menjawab hipotesis akan dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Uji t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kesimpulan dari uji t adalah jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $p-value < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Untuk uji F, akan dilihat dari nilai  $p-value < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Selain itu, dalam uji hipotesis juga akan dilihat nilai koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat kontribusi variabel terikat terhadap variabel bebas. Persamaan regresi linier berganda penelitian dapat dituliskan melalui persamaan berikut:  $PAD = b_0 + b_1JP + b_2PP + e$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisa terhadap data, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Uji normalitas, kesimpulan dari uji normalitas dilihat dari nilai probabilitas JB sebesar 0,428008. Dimana  $0,428008 > 0,05$ . Sehingga data PAD, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah dikatakan berdistribusi normal. Berikut grafik yang memperlihatkan hasil uji normalitas.

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Uji linieritas, hasil uji linieritas dapat dilihat dari tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Linieritas**

Ramsey RESET Test			
Equation: UNTITLED			
Specification: PAD C JP PP			
Omitted Variables: Squares of fitted values			
	Value	Df	Probability
t-statistic	5,269926	26	0,0001
F-statistic	27,77212	(1, 26)	0,0001
Likelihood ratio	21,79976	1	0,0001

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai *p-value* ( $0,0001 < 0,05$ ), sehingga disimpulkan bahwa antara variabel jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan PAD memiliki hubungan yang linier. Uji asumsi klasik; **pertama**, hasil uji multikolinearitas ditemukan tidak terjadi multikolonearitas karena nilai VIF ( $3,557802 < 10$ ). Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji multikolineritas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2,444412	311,0937	NA
JP	19650,01	362,1064	3,557802
PP	0,003073	6,077925	3,557802

**Kedua**, berdasarkan hasil uji autokorelasi disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada data time series yang digunakan. Hal ini dilihat dari dilihat *Obs\*R-Squared* ( $0,658000 > 0,05$ ). Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji autokorelasi;

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0,280315	Prob. F(2,25)	0,7579
Obs*R-squared	0,658000	Prob. Chi-Square(2)	0,7196

**Ketiga**, hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas *Obs\*R-squared* ( $0,285148 > 0,05$ ). Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji heterokedastisitas.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0,129548	Prob. F(2,27)	0,8790
Obs*R-squared	0,285148	Prob. Chi-Square(2)	0,8671
Scaled explained SS	1,639631	Prob. Chi-Square(2)	0,4405

Uji hipotesis, kesimpulan dari hasil uji t (secara parsial) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2651676.	1562274.	-1,697318	0,1011
JP	252,3164	140,1785	1,799965	<b>0,0831</b>
PP	0,447383	0,055433	8,070640	<b>0,0000</b>
R-squared	0,924562	Mean dependent var	1502059.	
Adjusted R-squared	0,918974	S.D. dependent var	1704355.	
S.E. of regression	485145,8	Akaike info criterion	29,11693	
Sum squared resid	6,355512	Schwarz criterion	29,25705	
Log likelihood	-433,7539	Hannan-Quinn criter.	29,16175	

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa; **Pertama**, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilihat dari nilai prob. t-statistik ( $0,0831 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$   $1,799965 < 2,0518$ . **Kedua**, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan ini dilihat dari nilai prob. t-statistik ( $0,0000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $8,070640 > 2,0518$ .

Sementara itu, untuk hasil uji F (secara simultan) dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

F-statistic	165,4550
Prob(F-statistic)	<b>0,000000</b>

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai Probabilitas  $(0,000000) < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semua variabel bebas (jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Untuk hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), disimpulkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,924 atau 92,4%. Sisanya 7,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Berikut tabel hasil uji  $R^2$ .

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0,924562
Adjusted R-squared	0,918974
S.E. of regression	485145,8
Sum squared resid	6,355512
Log likelihood	-433,7539
F-statistic	165,4550
Prob(F-statistic)	0,000000

Analisis persamaan regresi linier berganda; persamaan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 03/18/18 Time: 06:05				
Sample: 1987 2016				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2651676.	1562274.	-1,697318	0,1011
JP	252,3164	140,1785	1,799965	0,0831
PP	0,447383	0,055433	8,070640	0,0000
R-squared	0,924562	Mean dependent var	1502059.	
Adjusted R-squared	0,918974	S.D. dependent var	1704355.	
S.E. of regression	485145,8	Akaike info criterion	29,11693	
Sum squared resid	6,355512	Schwarz criterion	29,25705	
Log likelihood	-433,7539	Hannan-Quinn criter.	29,16175	
F-statistic	165,4550	Durbin-Watson stat	2,157596	
Prob(F-statistic)	0,000000			

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan analisis regresi linear berganda penelitian ini adalah:  $PAD = -2651676 + 252,3164JP + 0,447383PP + e$ . Adapun intreperetasi

persamaan tersebut sebagai berikut: Nilai konstan sebesar -2651676 artinya apabila jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah bernilai 0, maka PAD Sumatera Utara hanya sebesar -2651676 juta. Nilai koefisien regresi pada JP sebesar 252,3164, artinya jika jumlah penduduk bertambah 1 juta orang sedangkan pengeluaran pemerintah tetap maka PAD Sumatera Utara akan meningkat sebesar 252,3164 juta. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang positif antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. Nilai koefisien regresi pada PP sebesar 0,447383, artinya jika pengeluaran pemerintah bertambah 1 juta sedangkan jumlah penduduk tetap, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0,447383 juta. Hubungan yang terjadi antara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara juga hubungan yang positif.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Hasil ini ternyata tidak sejalan dengan teori Dumairy yang mengatakan bahwa pertambahan penduduk bukanlah sekedar pertambahan penduduk semata tetapi juga dapat menaikkan daya beli (*purchasing power*) (Dumairy, 1996). Teori tersebut menyimpulkan bahwa penduduk mempunyai peran penting dalam mendukung naiknya daya beli, yang ditandai dengan naiknya tingkat pendapatan dari masyarakat, sehingga memperlancar sumber pendapatan kepada pemerintah daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Teori lain mengatakan bahwa besarnya komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, jumlah penduduk sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, sehingga jumlah penduduk tidak boleh terlalu banyak atau sedikit untuk memperoleh kenaikan pendapatan nasional (Lembaga Demografi, 2007). Menurut peneliti, alasan tidak ada pengaruh anatar jumlah penduduk dengan PAD disebabkan tidak semua masyarakat mempunyai penghasilan yang tinggi dan menuntut untuk mengeluarkan pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi untuk membayar pajak.

Sementara itu, untuk variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Hasil ini sejalan dengan teori Henry Faizal Noor, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Henry, 2013).

## KESIMPULAN

Secara parsial disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Karena dari nilai t-statistik  $(0,0831) > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$   $1,799965 < 2,0518$ . Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari nilai t-statistik  $(0,0000) < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $8,070640 < 2,0518$ . Namun jika dilihat secara simultan, maka jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dengan nilai probabilitas  $(0,000000) < 0,05$

## DAFTAR PUSTAKA

- Gilarso, T, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius.
- Guritno Mangkoesobroto, 1998, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPEE.
- Huda, Nurul Huda, 2012, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Ekonomika Pembangunan Masalah, Kebijakan, Dan Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Latumaerissa, R, Julius, 2015, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lembaga Demografi, 2007, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Noor, Faizal, Henry, 2013, *Ekonomi Publik*, Padang: Academia.
- Nurcholis, HanifNurcholis, 2005, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono, 2010, *Makroekonomi Teori Dan Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono, 2011, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Sukirno, Sadono, 2011, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana.

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Aliman Syahuri Zein

Sukirno, Sadono, 2015, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia.

Suparmoko, M, 2014, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wulandari, Artha, Phaureula dan Iryanie, Emy, 2018, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: DEEPUBLISH.